

ISSN 1412-9302

HALAQA

JURNAL KEPENDIDIKAN DAN KEISLAMAN

1. Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kualitas Pendidikan di Indonesia
Budi Haryanto
2. Analisis Sistem Pendidikan Nasional yang Berorientasi Masa Depan
Umni Shoidah
3. Reposisi Pendidikan di Era Globalisasi
Luluk Yunan Ruhendi
4. Modernisasi Pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh (1849-1905)
R. Salahuddin
5. Pengembangan Program Pembinaan Dosen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
M. Musfiqon
6. Konsep Ma'rifat menurut Dhu al-Nun al-Misry dan al-Ghazali
Akhtim Wahyuni
7. Perubahan Fungsi Pondok Pesantren dalam Pengembangan Budaya Nasional
Isa Anshori
8. Eksistensi Komunitas Muslim Abad ke-21 sampai 16 M
Koes Adiwidjajanto

FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

HALAQA

Vol. 2

No. 1

Hlm. 1 - 92

Sidoarjo
Oktober 2003

ISSN 1412-9302



HALAQA

JURNAL PENDIDIKAN DAN KEISLAMAN

Vol. 2, No. 1, Oktober 2003

Halaqa adalah jurnal Kependidikan dan Keislaman, Fakultas Tarbiyah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang menyampaikan hasil-hasil penelitian, artikel konseptual (non penelitian atau hasil pemikiran), review buku baru, dan obituari di bidang Kependidikan (meliputi: Psikologi, Sosiologi Pendidikan, Kurikulum, dan Falsafah Pendidikan) serta bidang Keislaman (meliputi: Teologi, Syariah, Sejarah, dan Pemikiran).

Terbit pertama kali tahun 2002.

Penanggung Jawab : Drs. Isa Anshori, M.Si.

Penyunting Ahli : Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni, MA (IAIN Sunan Ampel, Surabaya)
Prof. A. Malik Fajar, M.Sc (IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)
Prof. Dr. Muclas Samani, M.Pd (Universitas Negeri, Surabaya)
Prof. Dr. Imam Much'as, MA (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)
Prof. Dr. Imam Bawani, MA, Ph.D (IAIN Sunan Ampel, Surabaya)
Drs. Achmad Jainuri, MA, Ph.D (IAIN Sunan Ampel, Surabaya)
Drs. H. Abu Sufyan, M.Ag (IAIN Sunan Ampel, Surabaya)

Dewan Redaksi

Ketua : M. Musfiqon, S.Ag, M.Pd.
Wakil Ketua : Khoirul Huda, S.Ag, M.Ag.
Anggota : Drs. Mu'adz, M.Ag.
Drs. Budi Haryanto
Akhtim Wahyuni, S.Ag, M.
Umi Shoidah, S.Ag.

Sekretaris : Maya Diah Nirwana, S.Si

Bendahara : Dra. Istikomah, M.Ag.

Staf Administrasi : R. Salahuddin Tri P, S.Ag, M.Ag.
Umi Kulsum

Informasi Umum

Alamat Redaksi

Fakultas Tarbiyah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Kampus I : Jl. Mojopahit 666B Sidoarjo 61215. Telp. (031) 8945444-8950405
Fax. (031) 8949333

Jadwal Penerbitan. Halaqa diterbitkan dua kali setahun pada bulan Oktober dan April, oleh Fakultas Tarbiyah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Penyerahan Naskah. Naskah karya ilmiah asli hasil penelitian, artikel konseptual (non penelitian atau hasil pemikiran), review buku baru, dan obituari di bidang Kependidikan (meliputi: Psikologi, Sosiologi Pendidikan, Kurikulum, dan Falsafah Pendidikan) serta bidang Keislaman (meliputi: Teologi, Syariah, Sejarah, dan Pemikiran), yang diajukan untuk diterbitkan dalam bentuk cetakan dan dalam bentuk rekaman dalam disket yang dialamatkan kepada redaksi Halaqa, Fakultas Tarbiyah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Rekaman dalam disket ditulis dengan program pengolah data yang kompatibel seperti MS. Gambar dalam naskah harus jelas, yang dibuat dengan tinta cina atau dengan komputer yang dapat dicetak dengan printer untuk mendapatkan hasil cetakan yang baik.

Penerbitan Naskah. Naskah yang layak untuk diterbitkan ditentukan oleh Redaksi setelah mendapat rekomendasi dari Penyunting Ahli. Naskah yang memerlukan perbaikan menjadi tanggung jawab penulis dan naskah yang tidak dapat diterbitkan akan dikembalikan kepada penulis.

PERUBAHAN FUNGSI PONDOK PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA NASIONAL

Isa Anshori
Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Jl. Mojopahit No. 666 B Sidoarjo.

ABSTRACT

History witnesses that pondok pesantren has a significant role in the process of the formation of the national culture. Pondok pesantren not only has an important role in preserving local but also national cultures. However, there have been changes on the function of pondok pesantren in developing national culture. At first, pondok pesantren functioned as the centre of the development of local suistic culture, but later it becomes the center of the development of national culture. There has also been a change in the figure of kiyai who formerly concentrated on teaching and giving advices on religions and social aspects of life, nowadays, many of them involve in politics and bureaucracy. Their involvement in politics often neglect their main role in guiding the society.

Key words: pondok pesantren; national culture

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Sejarah telah membuktikan bahwa pesantren memiliki peran signifikan dalam proses pembentukan budaya bangsa, termasuk sektor pendidikan. Pesantren tidak hanya mengambil peran budaya lokal, tetapi juga budaya nasional. Telah terjadi perubahan-perubahan fungsi Pondok Pesantren dalam kerangka pengembangan kebudayaan nasional. Pondok Pesantren yang semula hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan budaya yang bermafaskan tasawuf yang berskala kecil dan lokal, berubah menjadi sentral pengembangan budaya berskala besar, nasional bahkan global. Di kalangan kiai juga terjadi perubahan, dari figur kiai yang pengasah dan pengasuh santri di Pondok Pesantren menjadi kiai agung, politikus, dan birokrat yang terkadang ada kesan tugas kekiyaiannya terabaikan. Perubahan fungsi Pondok Pesantren tersebut dikarenakan banyak hal. Diantaranya adalah perubahan orientasi dunia pesantren dari kebijakan kiai sebagai penguasa tunggal pesantren (*powership*) menjadi pemimpin, berubahnya cita-cita ideal para pengasuh dan para santri, adanya kepentingan pengurus pesantren dan pemerintah terhadap pesantren, dan semakin besarnya pengaruh perkembangan peradaban dunia yang dinafasi oleh *science* dan teknologi.

Kata-kata kunci: Pondok Pesantren, budaya nasional

PENDAHULUAN

Sejarah telah membuktikan, bahwa kehadiran pondok pesantren telah mengambil peran penting dalam perintisan dan pengisian kemerdekaan Indonesia yang kaya dengan kebudayaan. Karena itulah

Perubahan Fungsi Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Budaya Nasional

tidak heran bila Dr. Sutomo dan Ki Hadjar Dewantoro sewaktu "Polemik Kebudayaan" di Perguruan Indonesia Solo pada tanggal 8-10 Juni 1935 mengusulkan agar dalam mengembangkan kebudayaan nasional ada perhatian yang lebih banyak untuk sistem pendidikan pesantren, di samping warisan kebudayaan nenek-moyang, dan untuk "puncak-puncak" kebudayaan suku-suku bangsa di daerah!

Sebagai bagian dari kebudayaan nasional, maka pesantren diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia; tetapi juga sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang dapat dipakai oleh semua warga negara Indonesia yang beraneka ragam itu, untuk saling berkomunikasi dan dengan demikian dapat memperkuat solidaritas.

Di samping itu, sebagai sub-unsur dalam unsur organisasi sosial kebudayaan nasional, pondok pesantren juga mengalami perubahan dalam berbagai sektor. Tidak hanya dalam bidang sistem budayanya (konsep, norma, dan peraturan pesantren), tetapi juga sistem sosial (aktivitas pesantren), dan kebudayaan fisik (gedung, peralatan, dsb). Terjadinya perubahan-perubahan tersebut seiring dengan penyebaran agama Islam oleh para wali dan kiai, khususnya idealisasi kiai, santri, para pengasuh dan pengurus pondok pesantren, kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lalu bagaimana proses perubahan fungsi pondok pesantren dalam kerangka pengembangan kebudayaan nasional tersebut? Mengapa proses perubahan itu terjadi di pondok pesantren? Permasalahan inilah yang akan dikaji dalam tulisan berikut dengan menggunakan perspektif teori Idealisme dan model "Media Interaksi" yang dikemukakan oleh Talcott Parson.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERGESERAN BUDAYA LOKAL MENUJU BUDAYA GLOBAL

Dengan teori idealismenya, Talcott Parsons menyatakan bahwa inti setiap masyarakat adalah jalinan makna, kepercayaan, dan nilai yang dianut bersama. Kepercayaan dan nilai suatu masyarakat dapat membentuk struktur cara-cara dasar mereka dalam mengorganisasikan kehidupan sosialnya. Sebagai contoh, masyarakat barat modern terorganisasi dengan bingkai dasar nilai-nilai kekristenan dan demokrasi liberal. Dia percaya bahwa karena orang Barat telah mengembangkan sistem nilai politik dan keagamaan ini, mereka mampu memecahkan problem kemasyarakatan tertentu yang masih menimpa banyak masyarakat lain yang anggotanya hidup dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang sangat berbeda.²

Sedangkan melalui model "Media Interaksi", Talcott Parsons menyatakan bahwa perubahan fungsi suatu masyarakat itu karena ada empat media. Menurutnya media adalah kapasitas perubahan suatu masyarakat (kelompok) ketika berinteraksi dengan kelompok atau sektor masyarakat lain, yaitu: Komitmen atau penyerapan nilai/gagasan dari luar, karena mereka merupakan satu-satunya yang benar dan relevan, kekuasaan (*power*), kemampuan satu pihak untuk memaksakan gagasannya kepada yang lain, Pemanfaatan (*utility*), terjadinya pengadopsian gagasan tertentu dan menguntungkan kelompok yang mengadopsi, dan pengaruh bila kelompok pengadopsi menganggap bahwa mereka telah menerima sesuatu yang dianggap baik³

- 1 Koentjaraningrat, *Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional*, (Jakarta: LIPI, 1982), 21.
- 2 Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro*, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1993), 6-7.
- 3 Manfred Oepen, *Dinamika Pesantren*, (Jakarta: P3M, 1988), 139

Pengaruh dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk memelihara lower gate melalui sebuah yang diorganisasi. Secara kongkrit hal ini terjadi bila satu partner jauh lebih unggul dalam hal teknologi maupun ekonomi dan tidak ada standar. Hal seperti ini sering terjadi dalam situasi berkembang versus negara industri, negara yang sedang membangun, seperti antara negara yang sedang termasuk dunia lawan kota.

Jelaslah bahwa soliditasnya pengaruh dan kekuasaan adalah media yang tidak memberikan kesempatan interaksi. Dominasi teknis ekonomi negara industri dianggap setara tinggi oleh negara miskin (kebudayaan). Situasi "interaksi tidak seimbang" ini menjadi lebih mantap lewat media kekuasaan, tidak hanya dibidang politik dan militer, tetapi juga kekuasaan ekonomi yang hanya berada di pihak yang mempengaruhi. Dalam konteks ini demikian penyempitan aspek material kebudayaan yang dominan oleh kebudayaan lainnya, bila tidak terjadi lewat media pengaruh atau media pemanfaatan dipaksakan lewat media kekuasaan.

Pengabdokasian substansial kebudayaan Barat (budaya teknologi) menyaratkan perubahan fungsi mendesak dari pondok pesantren, yaitu perubahan dari fungsi pengembangan budaya tradisional yang sifatnya lokal menjadi fungsi pengembangan budaya nasional yang sifatnya besar dan global. Perubahan fungsi budaya, dalam hal ini berarti perubahan prioritas dari nilai-nilai kehidupan yang selama ini dianut. Jika budaya teknologi merobek sistem tradisional tanpa menimbulkan perubahan prioritas nilai-nilai kehidupan pondok pesantren (atau secara perlahan-lahan diintegrasikan), dapat menimbulkan reaksi (defensif) budaya. Misalnya, dalam bentuk gerakan nasionalistik di pondok pesantren yang berusaha memajukan kembali (modernisasi) dari nilai utama yang dihayati. Reaksi-reaksi ini timbul karena situasi disharmoni dalam sistem budaya tradisional terjadi, sebagai akibat penetrasi sumber-sumber eksogenus. Reaksi defensif bisa juga timbul karena diskrepansi antara kesediaan pondok pesantren memakai produk material dari budaya teknologi, tidak diikuti oleh kesediaan mengadopsi aspek non-materialnya (nilai, etos, dan sebagainya). Padahal aspek material suatu kebudayaan tidak netral. Artinya tidak terpisahkan dari aspek non-material kebudayaan yang menghasilkannya.

Apakah dengan asumsi di atas dan dalam kurun waktu tertentu, pengadopsian aspek material (sarana teknologi) akan berdampak penetrasi aspek non-material budaya teknologi? Bila itu terjadi, apakah terjadinya perubahan fungsi pondok pesantren dalam kerangka pengembangan kebudayaan nasional juga dipengaruhi oleh pengadopsian aspek sarana teknologi dan penetrasi budaya teknologi? Teori kesenjangan budaya (the cultural lag theory) berasumsi bahwa alih budaya non-material dengan jarak waktu tertentu, akan terjadi sebagai akibat pengadopsian elemen-elemen budaya materi. Cepat lambatnya tergantung pada kapasitas adaptasi masyarakat atau budaya inferior untuk menerima komitmen pihak superior⁴.

Era industrialisasi sendiri akan membawa perubahan sosial, antara lain sikap rasional dan pragmatisme serta serba kepraktisan. Hal ini akan berbenturan dengan budaya-budaya keagamaan yang masih tampak di beberapa pesantren. Di satu pihak, hasil teknologi tepat guna sukar diterapkan oleh para santri di pedesaan, apabila sikap keberagamaan tidak segera dihadapi dengan baik dengan pembangunan dan pendidikan terpadu antara masalah agama an sich (keimanan dan ibadah) dengan pendidikan penalaran⁵.

⁴ ibid, 140

⁵ Bellan Effendi, *Membangun Martabat Manusia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), 296

DINAMIKA BUDAYA PESANTREN

Sejak Islam masuk di Indonesia, pondok pesantren telah berfungsi sebagai pengembangan budaya yang sifatnya lokal, yaitu pelepasan tarikat, karena memang waktu itu kegiatan Islam lebih banyak berorientasi dengan tarikat, di mana terbentuk kelompok-kelompok organisasi tarikat yang melaksanakan amalan-amalan dzikir dan wirid, yaitu dzikir dengan formula kata-kata berjumlah tertentu, serta para amalan-ibadah di bawah bimbingan seorang pemimpin tarikat. Untuk keperluan itu, para wali mendirikan pesantren sebagai tempat berkumpulnya para pengikutnya untuk melaksanakan ibadah yaitu tawajjuh bersama-sama sebagai anggota tarikat di sebuah masjid selama 40 hari dalam satu tahun untuk melakukan ibadah-ibadah di bawah bimbingan seorang pemimpin tarikat. Untuk keperluan itu, para wali menyediakan ruangan khusus untuk penginapan dan tempat memasak di kiri dan kanan masjid. Di samping amalan-amalan tarikat, pusat-pusat pesantren semacam itu mengajarkan kitab-kitab dalam berbagai cabang pengetahuan agama Islam kepada sejumlah pengikut wali (santri). Dengan demikian, pada masa ini lembaga-lembaga pengajaran untuk anak-anak dan lembaga-lembaga pesantren yang menjadi pusat organisasi tarikat tidak bisa dipisahkan, keduanya saling menunjang dan merupakan satu kesatuan struktur dalam sistem pendidikan tradisional.

Yang menarik untuk diperhatikan, ternyata sistem madrasah yang berkembang di negara-negara Islam lainnya sejak permulaan abad 12 M, tidak muncul di Indonesia. Pascahal sebelum itu, yaitu tahun 1082 M telah ada pesantren di Pamekasan Madura, yaitu Pesantren Jan Tampas II⁶ berarti sebelumnya juga ada pesantren yang lebih tua lagi, yaitu Pesantren Jan Tampas I. Hal ini berarti pondok pesantren mulai mengembangkan budaya tasawuf yang sifatnya lokal, belum terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar, baik itu ginyangskut nilai budaya, sistem penyelenggaraan aktivitas pesantren, maupun budaya fisiknya, pengaturannya, gedung, ruangan belajar, dan sebagainya.

Fungsi pondok pesantren mulai bergeser ke arah pengembangan budaya yang lebih besar, tidak hanya tasawuf tetapi juga budaya-budaya yang lain, seiring dengan penyebaran dan pendalaman Islam secara intensif yang terjadi pada abad ke-13 M sampai akhir abad ke-17 M. Dalam masa ini, berdiri pusat-pusat kekuasaan dan studi Islam, seperti di Aceh, Demak, Giri, Temate, dan Tidore, serta Gowa Tallo di Makassar. Dari pusat-pusat inilah kemudian Islam tersebar ke seluruh pelosok nusantara melalui para pedagang, wali, ulama, mubaligh, dan sebagainya dengan mendirikan pesantren, dayat, dan surau⁷. Sejak abad ke-15 M, Islam praktis telah menggantikan dominasi ajaran Hindu, dan sejak abad ke-16 M melalui kerajaan Islam pertama, yaitu Demak, seluruh Jawa dengan perkecualan yang tak berarti, seperti di bagian pedalaman dan pegunungan, telah dapat di-Islam-kan⁸ yang berarti ajaran tasawuf juga tidak hanya tersebar pada santri, tetapi pada masyarakat umum, bahkan para pejabat kerajaan dengan formulasi ajaran yang beraneka ragam.

Perubahan fungsi pesantren sangat mencolok dengan mulai hadirnya madrasah di pondok pesantren pada abad ke-16 M⁹ tetapi masih bercorak tasawuf. Pesantren-pesantren tersebut mengajarkan berbagai kitab Islam klasik dalam bidang jurisprudensi, teologi, dan tasawuf. Tidak seperti keadaan di negara-negara Arab, budaya pesantren di Jawa sejak bentuknya yang paling tua telah merupakan

6 Depdik RI, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren*, (Jakarta: Proyek Pembinaan dan Bantuan kepada Pondok Pesantren, 1984/1995), 668.

7 *Majalah Ulama' Indonesia, Amanat Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Jakarta, Sekretariat MUI, 1996), 13-14.

8 S.T.S. Raffles, *The History of Java*, Vol II, (London: 2nd Edition, 1930), 2.

9 Zamkhsyari Dofir, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 34.

kombinasi antara madrasah dengan pusat kegiatan tarekat, terjadi pada abad ke-18, seperti yang muncul sejak masuknya gerakan wahabi di Sumatera tahun 1812 M kemudian merambat ke Jawa. Ada lainya seperti Muhammadiyah, Persis dan sebagainya¹⁰. Di Jawa, berkembang madrasah dan dengan aspek tarekat.

Sebelum tumbuhnya Islam moderen, di Jawa tidak muncul istilah ulama, ulama dan ulama daripada perkataan "ulama". Gelar "kiai" ini dalam lingkungan pesantren dipakai untuk memanggil sesama sarjana muslim yang menguasai bidang-bidang tasawuf, fiqh dan sebagainya. Istilah "ulama" juga pula tidak muncul istilah santri tradisional dan santri modern. Para santri ini banyak menguasai ilmu agama, tetapi sangat kurang dalam soal sains dan teknologi.

Pada abad ke-18 M, fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengabdian kepada rakyat terasa sangat berbobot terutama dalam bidang penyiaran agama. Kehidupan pesantren pada selalu diawali dengan cerita "perang nilai" antara pesantren yang akan berdirinya dengan masyarakat sekitarnya, dan diakhiri dengan kemenangan pihak pesantren, sehingga pesantren dapat diterima dalam hidup di masyarakat dan kemudian menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya dalam bidang kehidupan moral. Bahkan dengan hadirnya pesantren dengan jumlah santri yang banyak dan beragam dari berbagai masyarakat lain yang jauh, maka terjadi kontak budaya antara berbagai suku dan masyarakat sekitar. Kehidupan masyarakat sekitar menjadi semakin ramai, banyak berbagai-bagai soal yang kemudian muncul pasar santri di beberapa pesantren.

Nilai-nilai baru yang dibawa pesantren tersebut untuk mudahnya disebut dengan istilah "nilai-nilai hitam", yaitu nilai-nilai rendah dan tidak terpuji, seperti "mo'limo" atau "lana' nilai", yaitu: *madon* (mencuri), *madon* (melacur), *minum* (minum-minuman keras), *madat* (candu), dan lain-lain. Ada nilai-nilai lain yang tidak terpuji, seperti kebodohan, kecengkihan, gila-gila atau "sanak" (menggunakan *black magic* untuk menghancurkan lawan dengan kekuatan gaib), dan sebagainya.

Kebanyakan riwayat berdirinya sebuah pesantren diawali dengan cerita seorang ulama untuk menyebarkan agamanya dengan diikuti oleh satu-dua orang santrinya, yang bertindak sebagai *kalai*, yaitu orang yang magang (belajar ilmu) pada kiai. Kiai tersebut acak-acakan mencari atau menetap lebih dahulu di pinggir desa atau hutan kecil sekitar desa, kemudian mengadakan pengajian pada satu-dua orang desa, yang akhirnya diikuti oleh seluruh masyarakat desa. Di samping itu, agama hampir dapat dipastikan bahwa setiap kiai salaf (lama) memiliki kekuatan ilmu "kemagahan" atau kekuatan badan dan keahlian bela diri untuk mempertahankan diri atau melawan kejahatan.

Nampak pada abad ke-18 tersebut, kehadiran pesantren sangat dibutuhkan oleh masyarakat berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang berupaya mewariskan dan mengembangkan budaya (tasawuf), tetapi juga sebagai lembaga pendidikan yang mewariskan dan mengembangkan budaya lebih besar (rasionalitas dan tradisi masyarakat luas), lembaga penyiaran agama dan pusat pember-

10 Lothrop Stoddard, *The New World of Islam*, (Jakarta: 1968), 205-206.
11 Mubtaha, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INS, 1994), 21.

Perubahan Fungsi Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Budaya Nasional

perintis kemerdekaan. Pesantren berhasil menjadikan santrinya sebagai pelopor gerakan pengembangan Islam, pendobrak kebatilan dan pengusir penjajah yang *concern* terhadap rasa kebangsaan.

Selama masa kolonial, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang paling banyak berhubungan dengan rakyat, dan tidak berlebihan bila dinyatakan pesantren sebagai lembaga pendidikan *grass root people* yang sangat menyatu dengan kehidupan mereka. Menurunnya peranan pemimpin pribumi sebagai akibat dari konsolidasi kekuasaan Belanda, di mana para pemimpin ini akhirnya hanya sekedar menjadi alat Belanda, telah memperdalam jurang antara rakyat dengan pemimpin pribumi¹². Semakin terseretnya pemimpin pribumi ke dalam kekuasaan Belanda, juga mengakibatkan para pemimpin ini dikucilkan dari Islam. Para priyayi yang bersikap lebih menyenangkan penguasa asing, begitu berhati-hati untuk menghindari kecurigaan Belanda untuk berhubungan dengan orang-orang yang dicap Belanda "Orang-orang fanatik"; akibatnya mereka menjadi sasaran penghinaan para kiai dan santri.¹³ Inilah yang menyebabkan munculnya semangat baru dalam keagamaan (*religious revivalism*) yang kemudian melahirkan tumbuhnya proto-nasionalisme dari santri pondok pesantren di abad 19 M.

Di samping itu, perkembangan yang sangat penting sejak pertengahan abad ke-19 M adalah banyaknya anak muda santri dari Jawa yang tinggal menetap beberapa tahun di Makkah dan Madinah untuk memperdalam ilmu pengetahuan Islam. Bahkan banyak di antara mereka menjadi ulama yang terkenal dan mengajar di Makkah atau Madinah. Karena para ulama ini akhirnya turut aktif dalam alam intelektualisme dan spiritualisme Islam yang berpusat di Makkah dan Madinah, maka akhirnya mereka juga turut mempengaruhi perubahan watak Islam di Jawa. Karena semakin kuatnya keterlibatan mereka dalam kehidupan intelektual dan spiritual Timur Tengah, Islam di Jawa makin kehilangan sifat-sifatnya yang lokal yang menitikberatkan pada aspek tarekat¹⁴. Sejak ini pulalah muncul perselisihan antara santri yang ingin mempertahankan tradisi lokal dan bermafas Tariqot dengan santri yang ingin melakukan pembaharuan-pembaharuan pemikiran Islam dan pemurnian ajaran Islam. Santri yang terkesan lugu, saat ini mulai nampak berpikir kritis yang kemudian muncul dalam bentuk gerakan pemurnian ajaran Islam (kelompok santri lainnya bersikukuh mempertahankan paham dan tradisi lokalnya) dan gerakan pemusnahan kolonialisme dari bumi Indonesia. Munculnya gerakan tersebut menjadikan pesantren berubah fungsinya dari pewarisan dan pengembangan budaya yang berorientasi pada pendalaman ajaran agama *an sich* menjadi fungsi multi orientasi agama dan politik. Sudah tentu keuntungannya, pesantren semakin kaya dengan kebudayaan.

12 Sartono Kartodirdjo, *The Peasant's Revolt in Banten in 1888 The Hague, 1966 and Protes Movements in Rural Java*. (Singapore: Oxford University Press, Institute of Southeast Asian Studies, 1973), 155

13 A. Djajadiningrat, *Herinneringen Van Pangeran Ario Achmed Djajadiningrat Amsterdam and Batavia*, (G. Kolff, 1936), 23.

14 Sartono Kartodirdjo, *Op Cit.*, 140-141.

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI PESANTREN

Pada aspek penyelenggaraan, fungsi pesantren mengalami perubahan yang sangat besar, yaitu dalam tahun 1910 M pesantren mulai membuka pondok untuk santri wali (antara lain Pesantren Dewantara Jombang), dan tahun 1920-an beberapa pesantren (antara lain pesantren Tebuireng Jombang dan pesantren Singosari Malang) mulai mengajarkan pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Belanda, Berhitung, Ilmu Bumi, dan Sejarah¹⁵. Ini berarti, penyamarataan kesempatan dan peran antara kaum wanita dan laki-laki mulai terjadi.

Diperkenalkannya sistem madrasah, kesempatan pendidikan untuk santri putri, dan pengajaran pengetahuan umum dalam lingkungan pesantren merupakan jawaban positif para kiai terhadap perubahan-perubahan sebagai akibat politik Belanda di Indonesia sejak akhir abad ke-19 M. Mulai saat itu, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan Barat untuk penduduk pribumi. Sekolah-sekolah ini dibuka dan dikembangkan oleh Belanda atas saran Snouck Hurgronje. Tujuannya untuk memperluas pengaruh pemerintahan kolonial Belanda dan membatasi pengaruh pesantren yang semakin meluas di masyarakat. Menurutny, masa depan jajahan Belanda tergantung pada penyatuan wilayah tersebut dengan kebudayaan Belanda. Bila ini terjadi, berarti merupakan westernisasi kaum ningrat dan priyayi di Jawa pertama kali. Agar penyatuan ini menjadi kenyataan, sistem pendidikan Barat harus diperluas agar lebih banyak penduduk pribumi yang memperoleh pendidikan Belanda. Dasar pikirannya bahwa sistem pendidikan Barat merupakan sarana yang paling baik untuk mengurangi dan akhirnya mengakhiri Islam di wilayah jajahan Belanda. Dia yakin, bahwa persaingan antara Islam dengan pendidikan model Barat, Islam pasti kalah. Snouck Hurgronje melihat, gejala ini dengan adanya kecenderungan bahwa sampai tahun 1890 jumlah pesantren bertambah, sedangkan 20 tahun kemudian sekolah-sekolah tipe Belanda semakin mendapat simpati dari santri.¹⁶

Memang benar apa yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, model pendidikan Barat mampu memikat para santri, dan kemudian terjadilah perombakan pada beberapa pesantren sejak permulaan abad ke-20 M, ada dua alasan mengapa masih ada pesantren yang tidak dilakukan pembaharuan, pertama para kiyai masih harus mempertahankan dasar-dasar tujuan pendidikan pesantren untuk mempertahankan dan menyebarkan Islam, dan kedua mereka belum memiliki alat sesuai dengan kebutuhan pembaharuan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan umum, yaitu masuknya madrasah dengan menyajikan materi pelajaran umum ke pesantren, tetapi bukan berarti para santri itu kemudian karyut pada peradaban Barat yang mendukung penjajahan Belanda, justru terjadilah rasionalisasi di kalangan kaum santri yang menyebabkan Belanda sendiri dan penjajah lainnya tersingkirkan. Para santri lulusan madrasah tersebut yang kemudian di awal kemerdekaan dipertenankan memasuki sekolah umum dan perguruan tinggi, memang dapat menggantikan posisi kiai sebagai kolompok berintelektual tinggi dan pemimpin masyarakat, bahkan dapat memasuki sektor birokrasi dan perusahaan modern.

Sejak berkembangnya sistem madrasah di pesantren tersebut, salah satu ciri penting dari budaya pesantren menghilang, yaitu budaya "santri kelana". Diterapkannya sistem kelas yang berlingkuk tingkat dan ketergantungan kepada ijazah formal sebagai tanda keberhasilan pendidikan seorang santri,

¹⁵ Zamkhatyari Dhoik, *Op Cit*, 88

¹⁶ H. A. Benda, *The Crescent and the Rising Sun, Indonesia Islam Under the Japanese Occupation of Java* (The Hague: W. Van Hoeve, 1952), 27.

Pengaruh Fungsional Pesantren Dalam Pengembangan Budaya Nasional

menyediakan seorang santri harus tinggal dalam satu pesantren saja untuk waktu berturut-turut. Jika yang sudah belajar tidak mungkin mengulang sekolah lain dengan kiai yang lain untuk tidak menyebarkan kiai ke seluruh di suatu pesantren.

Namun demikian, pesantren dapat memaknai hasil yang positif dengan sistem madrasah, yaitu ketidakhadiran para kiai mengkonsepsikan fungsi dan kedudukan pesantren dalam mengatasi perkembangan sekolah-sekolah Belanda. Dalam tahun 1920-an sampai 1950-an, jumlah pesantren besar dan santri santrinya melonjak berlipat ganda. Sebelum tahun 1920, pesantren-pesantren besar hanya mempunyai sekitar 200 santri, tetapi sejak permulaan tahun 1930 banyak pesantren, misalnya Tebuireng yang mempunyai jumlah santri lebih dari 1500 orang. Pada masa ini, fungsi pondok pesantren tidak hanya sebagai lembaga pewartan dan pengembangan budaya yang berorientasi pada tasawuf, tetapi juga budaya nasional yang berorientasi pada rasionalitas dan tindakan-tindakan politik, serta ekonomi.

Pengaruh yang luar biasa dari partai-partai dalam kehidupan politik di Indonesia antara tahun 1910 sampai tahun 1960 sebagian besar karena pesatnya perkembangan pesantren dan banyaknya para kiai dan santri yang terlibat dalam dunia politik. Pengaruh dominan dari pesantren mulai menurun secara drastis setelah penyerahan kedaulatan RI pada bulan Desember 1949 (dari Belanda yang ingin menguasai Indonesia lagi kepada pemerintah RI).

Setelah penyerahan kedaulatan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan sekolah umum sekuler luasnya dan jabatan-jabatan administrasi modern terbuka secara luas bagi mereka yang memiliki ijazah sekolah tersebut. Hal ini mengakibatkan anak muda kurang tertarik terhadap pesantren. Banyak pesantren kecil sejak tahun 1950 ini musnah, pesantren-pesantren besar dapat bertahan hanya karena sudah mendirikan sekolah-sekolah umum, SD, ISMP, dan SMA dan kejuruan, misalnya SMA, STM, dan sebagainya, bahkan perguruan tinggi di pesantren tersebut.

Pemerintah sendiri kemudian mengambil kebijakan pendidikan secara terbuka, yaitu semua kalangan masyarakat bisa menikmati pendidikan di sekolah, tidak hanya pada pendidikan tingkat dasar, tetapi juga tingkat menengah dan pendidikan tinggi, asalkan memiliki kemauan dan dapat memenuhi syarat administratif yang dibutuhkan.

Pada masa itulah fungsi pesantren dalam pengembangan budaya nasional benar-benar terlihat. Terbukti dari perubahan orientasi pesantren ke pendidikan nasional yang tercermin pada kurikulum, aktivitas-aktivitas pendidikan dan pengajaran, sistem pendidikan dan pengajaran, bahkan fasilitas yang ada di pondok pesantren.

Bagi kaum santri itu merupakan babak baru, mengingat sebelumnya pendidikan yang ditempuh masih terbatas pada dunia pesantren yang mengkaji ilmu-ilmu keuliyah semata. Dengan dibukanya sistem pendidikan tinggi yang memberikan peluang kepada kaum santri untuk mengenyam pendidikan model Barat yang memberikan ilmu-ilmu keuliyah, menjadikan mereka selangkah memiliki kemampuan untuk mengembangkan keliniannya, dan lebih jauh dapat turut serta dalam percaturan jaman.

Tidak seperti kaum priyayi yang larut dalam model pendidikan Barat, atau setidaknya tidak bisa dibalang menuju demikian, ternyata tidak sedikit kaum santri yang mencoba menjaga jarak dari model pendidikan semacam itu. Mereka tidak begitu saja menyerap ilmu-ilmu sekuler dan melepaskan baju kesantriannya, tetapi pada aspek-aspek tertentu berupaya menggabungkannya. Untuk mengimbangi kelinuan yang diperoleh dari sistem pendidikan tersebut, mereka berupaya mengkaji Islam secara kaffah baik keuliyah maupun keuliyah, tidak hanya dilakukan secara individual tetapi lebih banyak secara komunal, dalam bentuk kelompok-kelompok studi dan diskusi keislaman, bahkan berupa

organisasi kemahasiswaan Islam semisal HMI, yaitu organisasi mahasiswa Islam tertua di Indonesia didirikan oleh Lafran Pane dan teman-temannya di UII Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1947 M. Mereka sadar akan keterbelakangan umat Islam akibat pertikaian-pertikaian internal, dan selalu berupaya menyatukannya, disamping mengkaji Islam dari berbagai dimensi keilmuan, serta turut serta memberikan asset dalam pergerakan nasional.¹⁷

Kaum santri inilah yang belakangan muncul sebagai cendekiawan muslim. Mereka memiliki ciri-ciri umum seperti cendekiawan lainnya; berwawasan lebih luas dan memiliki bekal keterampilan profesional yang lebih memadai, mereka suka memproduksi ide, bersikap kritis, kreatif, konstruktif, obyektif, analitis, dan bertanggungjawab. Perbedaannya dengan cendekiawan pada umumnya adalah mereka memiliki komitmen iman dan perjuangan cukup tinggi, serta setiap aktivitas yang mereka lakukan berpedoman pada sistem nilai moral ilahiah. Kehadirannya mulai sangat nampak pada tahun 1970-an, yaitu dengan menduduki posisi penting di berbagai instansi, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dengan kata lain, budaya kaum santri mengalami pergeseran dari budaya keagamaan an sich, baik yang berpaham tariqot/sufi maupun berfaham qurani menjadi budaya politik konservatif, kemudian berubah menjadi budaya keilmuan dan keterampilan profesional yang penuh dengan semangat kerja di berbagai sektor kehidupan, serta tanpa kehilangan *ruuhul jihad fi sabilillah*.

Sudah tentu, kaum santri tersebut memiliki variasi pandangan, yang pada aspek-aspek tertentu bertentangan satu sama lainnya. Karena itulah maka kemudian muncul kelompok muslim yang berpendidikan tinggi yang berhimpun dalam berbagai wadah perjuangan, semisal ICMI, forum demokrasi, dan sebagainya. Sekalipun demikian, persepsi intern kelompok dan dengan antar kelompok intelektual muslim tidak dapat dihindarkan. Hal ini terjadi mengingat basic pendidikan pesantren dan kultur kehidupan yang membentuk paham keagamaan dan pola berpikir mereka berbeda, sekalipun telah menempuh pendidikan tinggi, disamping itu juga mereka mempunyai kepentingan yang berbeda pula.

Hal ini dikarenakan, pesantren sebagai produk para santri mengalami perubahan orientasi yang tercermin dari munculnya dua tipe pesantren besar, yaitu pesantren *salaf* dan pesantren *khalaf*.¹⁸ Di mana pesantren *salaf* tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan pesantren. Sistem madrasah diterapkan untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenakan pengajaran pengetahuan umum, misalnya pesantren Lirboyo dan Ploso di Kediri, pesantren Maslakul Huda di Pati, dan pesantren Tremas di Pacitan. Sedangkan pesantren *khalaf* memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah yang dikembangkan, atau membuka sekolah umum dalam lingkungan pesantren. Pondok modern Gontor tidak mengajarkan lagi kitab-kitab Islam klasik dan tidak pula membuka sekolah Umum, yang ada adalah madrasah dan perguruan tinggi agama Islam dengan menekankan penguasaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Pesantren Karangasem dan Moderen Muhammadiyah di Pacitan-Lamongan di samping mempunyai madrasah juga mendirikan sekolah umum, SLTP dan SMA, bahkan perguruan tinggi, tidak mengajarkan kitab-kitab klasik, tetapi kitab-kitab yang bermanfaat pemurnian dan pembaharuan paham Islam. Pesantren besar seperti Tabuireng dan Rejoso di Jombang telah membuka SLTP, SMA dan universitas, sementara itu tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik, serta kainya aktif dalam partai politik dan menjadi anggota DPR dan MPR RI.

¹⁷ Isa Anshari, *Cendekiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Surabaya: PT. Sinar Ilmiah, 1991), 4-7.

¹⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Op Cit*, 41.

Perubahan Fungsi Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Budaya Nasional

Sudah tentu masing-masing pesantren tersebut melahirkan santri yang berbeda. Bagi pesantren *salaf*, santri yang dilahirkan cenderung memiliki fanatisme keagamaan cukup tinggi dan tidak mudah menerima pembaharuan-pembaharuan zaman, serta tidak begitu tertarik pada persoalan politik dan jabatan di instansi-instansi pemerintah. Namun pada pesantren *khalaf* terjadi variasi performa santri, mereka tertarik dalam soal politik dan jabatan di instansi pemerintah dengan versi berbeda. Bagi santri *Khalaf* yang diajarkan kitab klasik cenderung untuk mempertahankan tradisi dan sangat tertutup dalam soal paham keagamaan, sedangkan santri *khalaf* yang diajarkan kitab-kitab modern lebih cenderung untuk mendobrak tradisi dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan paham keagamaan sesuai dengan perkembangan zaman. Keduanya memang mampu mempengaruhi dan mewarnai tradisi berfikir, bersikap, dan berperilaku para santri, sekalipun mereka telah mengenyam pendidikan tinggi, bahkan berkecimpung dalam berbagai aktivitas kehidupan di masyarakat dan negara.

Kita sering menjumpai akhir-akhir ini, betapa sengitnya pertentangan mereka, bahkan terkadang terlihat sudah tidak merupakan persaingan yang sehat lagi. Dalam soal agama saja yang jelas itu ritual, misalnya penentuan hari raya ada yang berani mempertaruhkan. Para kiai sendiri cenderung turut serta dalam bidang politik, menduduki jabatan di DPR maupun MPR RI, sehingga sering meninggalkan pesantren dan pendidikan santrinya diserahkan pada para asistennya.

ANALISA PERUBAHAN FUNGSI PESANTREN

Dengan menggunakan perspektif teori tersebut, tentu saja berubahnya fungsi pesantren dalam kerangka pengembangan budaya nasional tidak lepas dari jalinan makna, kepercayaan dan nilai yang dianut bersama oleh kaum santri, disamping itu juga makna, kepercayaan dan nilai yang dianut oleh kiai sebagai penguasa pesantren yang telah membesarkan para santri. Bahkan apa yang dinamakan komitmen para kiai, pengasuh, pengurus dan santri, *power* para penguasa, beserta pemanfaatan dan pengaruh penguasaan dan perkembangan budaya dan teknologi sangat menentukan terhadap terjadinya perubahan-perubahan budaya di kalangan kaum santri.

Terjadinya perubahan fungsi pondok pesantren dalam kerangka pengembangan budaya nasional ditandai dengan hadirnya berbagai lembaga pendidikan di pondok pesantren, seiring perkembangan zaman dan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pondok pesantren.

Pesantren yang dahulunya hanya menyuguhkan aktivitas-aktivitas keagamaan berupa kajian-kajian kitab agama berbentuk *sorogan* (bimbingan individual) dan *bandongan* (ceramah umum) dengan tanpa pembagian kelas, berubah menjadi lembaga pendidikan keagamaan dengan sistem madrasah mengkaji kitab-kitab agama dan pelajaran umum, bahkan kemudian merupakan sentral pendidikan dengan multi sistem, yaitu sistem pesantren, sistem madrasah, sistem persekolahan, serta akhir-akhir ini ditambahkan pula dengan kurikulum muatan lokal berupa keterampilan-keterampilan khusus.¹⁹ Terlebih lagi dengan didirikannya perguruan tinggi di berbagai pondok pesantren tersebut. Belum lagi masuknya media informasi ke pondok pesantren, misalnya: TV, koran, majalah, radio dan Pusat Informasi Pesantren (PIP) yang diprogram oleh pemerintah. Sudah tentu, adanya perubahan ini tidak lepas dari peran para kiai sebagai penguasa tunggal di pesantren yang mulai terbuka akan perubahan zaman.

¹⁹ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1986); 1-102.

Dengan adanya kebijakan klai dari pemerintah ialah memungkinkan bagi para santri untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi, tidak hanya yang berlatar belakang agama, misalnya IAIN, tetapi juga perguruan tinggi umum, sehingga terjadilah mobilisasi di kalangan kaum santri, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Pada awalnya, lulusan pondok pesantren hanya bisa menjadi guru, pengajar atau pedagang, yang terakhir ini justru tidak pernah diajarkan selama di pesantren, dan tidak lagi demikian, segala profesi bisa dimasuki dan dikuasai sepanjang relevan dengan disiplin keislamannya.

Sudah tentu, fenomena semacam ini tidak hanya berdampak pada berubahnya fungsi pondok pesantren dalam pengembangan budayanya lokal ke budaya nasional, tetapi juga berdampak pada perubahan lapangan kehidupan dan budaya kaum santri, baik yang masih berada di pondok pesantren maupun yang sudah menyelesaikan studinya sampai perguruan tinggi. Bahkan dalam kenyataannya, untuk saat sekarang dapat menentukan budaya dan corak budaya kenegaraan, berupa upacara-upacara kenegaraan, misalnya para pejabat tidak enggan lagi mengucapkan salam sewaktu acara tersebut, sampai pada taraf pengambilan kebijakan kenegaraan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, misalnya UU Peradilan Agama, penentuan hari raya, pengontrolan makanan haram-haram, pemberantasan kemiskinan, dan sebagainya.

Kalau disimak lebih lanjut, pada dasarnya semua pesantren berangkat dari sumber yang sama, yaitu ajaran Islam. Namun terdapat perbedaan filsafat di antara mereka dalam memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Islam pada bidang pendidikan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang melingkarkannya. Perbedaan-perbedaan itu pada dasarnya berputar pada perbedaan pandangan hidup klai yang memimpin pesantren mengenai konsep teologi, manusia, dan kehidupan. Tugas dan tanggungjawab manusia terhadap kehidupan dan pendidikan. Dalam kenyataannya, masing-masing pesantren mempunyai ciri khas sendiri-sendiri yang berbeda satu dan yang lain, sesuai dengan kekuatan bidang studi yang dilakukan dan gaya kepemimpinan yang di bawah²⁰. Karena itu pula dalam pengembangan budaya juga bervariasi, ada pondok pesantren yang berupaya mempertahankan dan mengembangkan budaya yang bercorak tradisional tetapi ada juga yang mengembangkan budaya yang lebih bercorak modern sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada awalnya, pondok pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu lembaga yang digunakan untuk penyebaran agama dan berfungsi sebagai pengembangan budaya lokal, yakni tempat mempelajari agama Islam. Mengingat sampai abad 16 M pengaruh ajaran tasawuf dan Hindu sangat kuat, maka performa kaum santri lebih bercorak sufi dan masih bernafas Hindu-sentris, bahkan arti mereka lebih cenderung mengamalkan paham tersebut dalam kehidupan individual dan berfokus pada kelompok santri saja.

Selanjutnya lembaga ini mulai abad 16 M, fungsinya dalam pengembangan budaya semakin meluas, yakni selain sebagai pusat penyebaran dan belajar agama yang sifatnya lokal, juga menggerakkan tenaga-tenaga bagi pengembangan agama Islam ke masyarakat yang lebih luas. Mengingat, umat Islam sudah berkuasa, ditandai dengan munculnya beberapa kerajaan Islam, misalnya di Aceh, Damak, Giri, Ternate, Tidore, dan Gowa Tallo di Makassar. Maka terjadilah perubahan orientasi pesantren, yakni keinginan untuk mencetak tenaga-tenaga yang mampu menyebarkan agama yang bermahkota Islam secara murni tanpa diwarnai ajaran Hindu. Untuk mencapai misi itu, maka dibukuklah madrasah di beberapa pesantren dengan mengajarkan kitab-kitab agama dalam bidang jurisprudensi, fiqh, dan tasawuf. Orientasinya, bagaimana agar pesantren melahirkan para santri yang mampu menyebarkan

²⁰ Mawardi, Op Cit, 19.

Perubahan Fungsi Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Budaya Nasional

agama Islam secara benar dengan tanpa menorehkan rasa kesukuan dan berada dalam satu paham, bahwa yang menyebabkan para santri yang dihasilkan dari pesantren ini memiliki semangat juang tinggi dalam menyebarkan Islam, dan tidak muncul deskriminasi antar santri (tidak ada istilah santri tradisional dan santri modern).

Mengingat agama Islam mengatur bukan saja amalan-amalan peribadatan, apalagi sekedar hubungan orang dengan Tuhannya, melainkan juga perilaku kelakuan orang dalam hubungan dengan sesama dan dunianya. Maka terjadilah perubahan di pesantren yang berimbas pada performa kaum santri di abad 18 M. Fungsi pondok pesantren berubah menjadi pusat gerakan politik dengan melahirkan para santri yang memiliki protonasionalisme di abad 19 M. Hal ini dikarenakan adanya penjajahan yang cukup kejam dari kaum Belanda, bahkan kaum santri dideskridikan. Di samping itu terjadi pencerahan di kalangan kaum santri, sehingga mereka tersadarkan diri untuk memusuhi terhadap segala bentuk penjajahan.

Di samping itu, hadirnya para ilmuwan Islam pada abad 19 M merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi perubahan orientasi pesantren dan tradisi para santri yang lebih rasional dan penuh dengan tindakan-tindakan politis. Ditopang lagi adanya kebijakan politik pendidikan Belanda yang mulai terbuka untuk memperkenankan budayanya di pesantren menjadikan kaum santri semakin cerdas dan tanggap akan eksistensi dirinya dan bagaimana seharusnya dia menentukan kiprah kehidupan melawan penjajahan. Sekalipun pada masa ini kemudian muncul kelompok santri tradisional dan modern (dengan adanya gerakan wahabi tersebut), tetapi mereka mampu menghalau segala bentuk penjajahan. Terjadilah perubahan dari budaya *nimo ing pondum* menjadi budaya yang lebih rasional dan frontal terhadap kebalikan.

Pesantren berubah fungsinya, dari sentral kajian agama menjadi pusat gerakan bagi penyebaran agama, gerakan bagi pemahaman kehidupan keagamaan dan gerakan-gerakan sosial-budaya. Kemampuan pondok pesantren bukan hanya dalam pembinaan pribadi muslim, melainkan juga bagi usaha mengadakan perubahan dan perbaikan budaya dan kemasyarakatan. Pengaruh pondok pesantren tidak saja terlihat pada kehidupan santri dan alumninya, melainkan juga meliputi kehidupan masyarakat sekitarnya.²¹

Di kalangan para kiai sendiri, karena sebagai arsitek kemasyarakatan (*social engineer*), ia harus memperhatikan selera masyarakat. Rupanya karena inilah mereka mampu bertahan untuk mengembangkan lembaga-lembaga pesantren dan disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan masa itu, sehingga tidak heran bila perubahan-perubahan sistem penyelenggaraan pesantren dari masa ke masa terus terjadi dengan tetap mempertahankan paham keagamaannya (ajaran yang dianut). Sekalipun sistem madrasah sejak abad 19 M (bahkan 16 M) telah ada, kemudian hadirnya lembaga-lembaga pendidikan umum di pesantren sejak adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan umum, kemudian hadir pula perguruan tinggi beserta teknologi tepat guna di pesantren; ternyata ciri khas kesantrenannya tidak hilang, dalam arti ada yang tetap bersikukuh mempertahankan tradisi tasawufnya sebagaimana semula. Tentu saja, kondisi ini juga mempengaruhi tradisi kaum santri, sebagai produk pesantren.

Diskriminasi di kalangan kaum santri --yaitu adanya santri tradisional dan santri modern, yang mulai muncul sejak hadirnya kaum wahabi di Indonesia ditopang oleh politik etnis Belanda, terus berlanjut

21 M. Dawan Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1988), 61.

hingga sekarang, sehingga tidak heran sering terjadi tindakan politik antar kontin sendiri. Semula pertentangan mereka yang berkaitan dengan paham keagamaan yang sifatnya khilafiyah, beradiah menjadi perselisihan dalam perebutan kekuasaan.

FUNGSI PESANTREN DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN BUDAYA NASIONAL

Pondok pesantren semula hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan budaya lokal yang diwarnai oleh nafas keagamaan an sich, penuh kedamaian dan rasa persatuan, berubah menjadi sentral pengembangan budaya dengan nafas politik keagamaan, bahkan politik individual, yaitu terjadinya konflik antar kaum santri sendiri karena perebutan kekuasaan yang berskala nasional dan besar. Agama terkadang digunakan sebagai alat untuk menopang kepentingan pribadi dan lupa kepentingan umat Islam. Di kalangan kiai juga terjadi perubahan, dari figur kiai yang pengasah dan pengasuh santri di pondok pesantren sampai kiai agung menjadi politikus dan birokrat yang terkadang lugas kekisiannya terabaikan. Sistem penyelenggaraan pesantren semula berbentuk *sorogan* dan *bandongan* dengan aktivitas keagamaan an sich berubah menjadi lembaga pendidikan dengan sistem madrasah, sistem sekolah bahkan memiliki perguruan tinggi dengan berbagai aktivitas kependidikan, agama, iptek, ekonomi, politik, dan sebagainya. Bangunan gedungnya tidak lagi berbentuk tradisional, tetapi sudah mengarah ke bentuk modern dengan ruangan-ruangan khusus.

Menurut Kuntowijoyo, pesantren kini tidak semata-mata sepenuhnya merupakan lembaga desa. Perjalanan pesantren melampaui tiga fase, yaitu ketika pesantren masih terpadu dengan desa, kemudian menjadi terpisah dari desa, dan akhirnya dapat menjadi lembaga yang sama sekali terlepas dari desanya. Pergeseran ini seiring dengan bertambah besarnya lembaga pesantren dan jumlah santrinya.²²

Sekalipun demikian, pesantren tetap berfungsi sebagai pengembangan dan pewarisan budaya asli, yakni budaya santri yang sudah tentu sangat besar sumbangannya terhadap pengembangan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional akan mantap apabila di satu pihak budaya-budaya nusantara asli tetap mantap dan di lain pihak kehidupan nasional dapat dihayati sebagai bermakna oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Budaya-budaya asli akan tetap mantap apabila diberi ruang dan diambil tindakan penunjang terbatas tertentu.²³

Kebudayaan nasional hanya dapat berkembang manakala merupakan usaha bersama keseluruhan masyarakat dan pemerintah, dengan berpatokan pada UUD 1945.²⁴ Begitu pula pondok pesantren akan dapat mengembangkan kebudayaan nasional manakala terjalin kebersamaan antara kiai, pengasuh, santri, pihak yayasan dan pemerintah dengan tetap berpatokan pada UUD 1945. Kebersamaan itu pula yang menjadi penjamin terjadinya pengalihan cara dan pandangan hidup itu dari generasi ke generasi berikutnya. Tetapi mustahil bila membayangkan proses pengalihan itu sebagai pewarisan barang jadi serba utuh menyeluruh dan serba kedap pengaruh, bahkan menyiratkan sanggahan terhadap adanya dinamika dalam kehidupan yang membudaya sebagaimana nampak nyata sepanjang sejarah kemiruisian sendiri. Meskipun demikian, perubahan yang terjadi tidak mungkin terlepas sama sekali dari apa yang telah ada sebelumnya.²⁵

²² Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Akal*, (Bandung: Mizan, 1991), 254.

²³ Franz Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1992), 41.

²⁴ Harsya W. Bachtiar, *Budaya dan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 1997), 25.

²⁵ Fuad Hassan, *Renungan Budaya*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), 15.

SIMPULAN

Dengan memperhatikan berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan-perubahan fungsi Pondok Pesantren dalam kerangka pengembangan kebudayaan nasional. Pondok pesantren semula hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan budaya yang bermanfaat kepada berakhlak kecil dan lokal, namun menjadi sentral pengembangan budaya bermanfaat positif berakhlak besar, nasional, dan global dengan tetap berpedoman pada UUD 1945. Agama terkandung kandungan digunakan sebagai alat untuk menopang kepentingan pribadi dan kelompok. Di kalangan Kiai juga terjadi perubahan, dari figur Kiai yang pengasih dan pengasih santri di pondok pesantren sampai Kiai agung menjadi politikus dan birokrat yang terkadang ada kesan tugas kekebihannya terlupakan.

Terjadinya perubahan fungsi pondok pesantren dalam kerangka pengembangan budaya nasional tersebut dikarenakan adanya perubahan orientasi dunia pesantren atas kebijakan Kiai sebagai penguasa tunggal pesantren (*powerhip*), berubahnya cita-cita ideal para pengasuh dan para santri, adanya kepentingan pengurus pesantren dan pemerintah terhadap pesantren, dan semakin besarnya pengaruh perkembangan peradaban dunia yang dinasti oleh *scienza* dan teknologi.

Perubahan fungsi pondok pesantren dalam kerangka pengembangan kebudayaan nasional tersebut dapat berimplikasi baik terhadap kaum santri maupun pranata kehidupan pada masa mendatang. Misalnya, konflik-konflik antar santri sendiri semakin seru, hal ini dikarenakan pahamnya berbeda (*fanatisme golongan tinggi*) dan masing-masing mereka ingin menduduki posisi penting di pemerintahan. Akibatnya, sekalipun banyak kaum santri yang menduduki posisi penting di pemerintahan, penciptaan kehidupan yang lebih mendukung bagi kepentingan umat Islam menjadi dipertanyakan dan agama dipolitair untuk menopang kepentingan individu dan golongan, bahkan urusan agama yang semula sakral berubah tidak sakral lagi (lebih cenderung dipolitair).

Jika ini terjadi, dikawatirkan kaum santri semakin kehilangan makna kesantriannya dan dunia pesantren tercerabut dari akar kesantriannya. Dari pesantren sulit lahir santri apalagi Kiai yang benar-benar mampu menjalankan tugas suci demi menegakkan agama Islam di tengah-tengah gencarnya kemajuan dan perkembangan jaman. Hal ini dikarenakan banyak pesantren yang berafiliasi menjadi lembaga pendidikan yang menyuguhkan formulasi pengetahuan umum dan sedikit kecapaian agama. Di kalangan Kiai sendiri, mereka tidak begitu konsentrasi untuk mengelca pesantrennya demi lahirnya sosok santri seperti konsep awalnya (benar-benar *tawadhuk* dan mampu berjihad *fi sabilillah* dengan tanpa pamrih). Mereka turut aktif dalam dunia politik guna menopang status sosial yang lebih tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdoh, Isa et al. 1991. *Cendekiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Cet. Ke-1. Surabaya: PT. Sina Ilmu.
- Zakaria, H.J. 1953. *The Crescent and the Rising Sun, Indonesia Islam Under the Japanese Occupation of Java*. The Hague: W. Van Hoeve, Ltd.
- Bachjar, Harsya W. 1987. *Budaya dan Manusia Indonesia*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Depag RI. 1994/1995. *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Bantuan kepada Pondok Pesantren.
- Dhahir, Zamakhsyari. 1985. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Cet. ke empat. Jakarta: LP3ES.
- Djajadiningrat, A. 1936. *Herinneringen Van Pangeran Ario Achmad Djajadiningrat Amsterdam and Batavia*. G. Kolff.
- Efendi, Sofian, dkk. 1992. *Membangun Martabat Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hassan, Fuad. 1989. *Renungan Budaya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Koenjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- _____. 1982. *Persepsi tentang Kebudayaan Nasional*. Jakarta: LIPI.
- Kartodirdjo, Sartono. 1973. *The Peasant's Revolt in Barten in 1888 The Hague, 1966, dan Prolet Movements in Rural Java*. Singapore: Oxford University Pres, Institute of Southeast Asian Studies.
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Majelis Ulama Indonesia. 1986. *Amanat Sejarah Umat Islam Indonesia*, Keputusan Rapat Pengurus Paripurna ke II. Jakarta: Sekretariat MUI, Masjid Istiqlal.
- Oepen, Manfred et. al. 1988. *Dinamika Pesantren*. Jakarta: P3M.
- Pusat Studi Interdisipliner tentang Islam. 1986. *Pembangunan Pendidikan dalam Pandangan Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Raharjo, M. Dawam (editor). 1988. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Raffles, S.L.S. 1830. *The History of Java*, Vol II, 2, Ad Editio. London.
- Suseno, Franz Magnis. 1992. *Filsafat Kebudayaan Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Stoddard, Lothrop. 1966. *The New Word of Islam*. tp. Jakarta.
- Sanderson, Stephen K. 1993. *Sosiologi Makro*. Edisi kedua, Cet. pertama, Januari. Jakarta: CV. Rajawali Pres.
- Steenbrink, Karl A. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES.